

**KERJASAMA TRILATERAL (INDONESIA-MALAYSIA-FILIPINA)
MELALUI PROGRAM TRILATERAL MARITIME PATROL
INDOMALPHI UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM DI
LAUT SULU-SULAWESI
(TAHUN 2016-2019)**

Rifky Ardiansyah
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan
Dipatiukur No. 112-114, Bandung, 40132, Indonesia
Email: kirimkerifky@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine Trilateral Cooperation (Indonesia, Malaysia, Philippines) through the Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMPI) program in the Sulu-Celebes Sea in 2016-2019. In this collaboration there are three programs of patrol activities that directly implement actions from coordinated patrols between Indonesia, Malaysia and the Philippines in the Sulu Sea – Celebes sea. The program is like carrying out the Port Visit of Indomalphi in carrying out joint patrols and carrying out joint military exercises between the Indonesian, Malaysian and Philippine military.

The researcher also analyzed the constraints of cooperation for each country, the obstacles faced by Indonesia, Malaysia and the Philippines, and the results of trilateral cooperation in the Sulu-Sulawesi Sea. The theory used by researchers is the theory of International Relations, International Cooperation and Transnational Organized Crime. The research method uses qualitative research methods. Most of the data collected is through library studies, online data tracking and documentation. Research was conducted at the Indonesian Center for Strategic and International Studies (CSIS) and the Indonesian Institute of Sciences Library.

The results of the study show that the collaboration between Indonesia, Malaysia and the Philippines in the Sulu-Celebes Sea since 2016 has yielded good results for each country such as the decreasing crime rate in the Sulu Sea-Celebes and this collaboration also has a direct impact on maritime security in Sulu-Celebes Sea area.

Keywords: *Trilateral Cooperation, Trilateral Maritime Patrol Indomalphi, Sulu-Celebes Sea*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kerjasama Trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) melalui program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMPI) di Laut Sulu-Sulawesi tahun 2016-2019. Di dalam kerjasama ini terdapat tiga program kegiatan patroli yang secara langsung mengimplementasikan aksi dari patroli terkoordinasi diantara Indonesia, Malaysia dan Filipina di laut Sulu – Sulawesi. Program tersebut seperti dilakukannya kegiatan *Port Visit* Indomalphi dalam melaksanakan patroli gabungan dan melaksanakan latihan militer gabungan diantara militer Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Peneliti juga menganalisa kendala dari kerjasama bagi masing-masing negara, kendala yang dihadapi oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina, dan hasil dari kerjasama trilateral di Laut Sulu-Sulawesi. Teori yang peneliti gunakan adalah teori Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional dan *Transnational Organized Crime*. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan adalah melalui studi kepustakaan, penelusuran data online dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di *Centre for strategic and international studies* (CSIS) Indonesia dan Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi semenjak tahun 2016 telah memberikan hasil yang baik bagi masing-masing negara seperti menurunnya tingkat kejahatan di laut Sulu-Sulawesi dan kerjasama ini juga berdampak langsung terhadap keamanan maritime di wilayah Laut Sulu-Sulawesi.

Kata Kunci: Kerjasama Trilateral, Trilateral Maritime Patrol Indomalphi, Laut Sulu-Sulawesi.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Laut Sulu dan laut Sulawesi adalah perairan besar di bagian timur Asia Tenggara. Laut Sulu dibatasi di barat laut oleh pulau Palawan di Filipina, di sebelah tenggara oleh kepulauan Sulu yang terdiri dari pulau Basilan, Jolo dan Tawi-Tawi dan di barat daya oleh negara bagian Sabah, Malaysia timur. Laut Sulawesi berbatasan dengan kepulauan Sulu dan Mindanao di utara, Sabah dan provinsi Kalimantan di sebelah barat, dan Sulawesi di selatan.

Pentingnya laut Sulu-Sulawesi bagi kerjasama kawasan merupakan hal yang harus lebih diperhatikan oleh Negara-negara di kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah laut tersebut, karena berdasarkan data setiap tahunnya ada kurang lebih dari 50 juta metric ton barang dan ada

lebih dari 15 juta pelaku bisnis yang melintasi perairan sulu-sulawesi.

Tingkat kejahatan di laut Sulu Pada awal 2016, banyak kasus kejahatan penculikan dan perampokan yang dilakukan demi meminta tebusan pada warga Negara yang di culik, yang dimana Negara harus memfokuskan kembali perhatian pada masalah pengawasan keamanan maritim di daerah tersebut. Pada bulan Maret dan April, para penjahat yang mengatasnamakan Abu Sayyaf Grup (ASG) yang bersenjata menyerang tiga kapal, dan menculik 18 kru kapal tersebut. Karena kru kapal yang diculik tersebut merupakan sebagian besar warga Indonesia, pihak pemerintah Indonesia menginisiasi dan mengajak dalam menyerukan kerja sama keamanan yang terkoordinasi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mengatasi masalah tersebut.

Tingkat kejahatan yang terjadi khususnya di daerah laut Sulu merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi ketiga Negara yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Sulu dan wilayah ini berpotensi menjadi markas bagi pelaku penjahat internasional. Teroris yang mengancam di wilayah laut Sulu ini yaitu Abu Sayyaf Grup dan ISIS merupakan pelaku kriminalitas yang harus segera diatasi karena kelompok tersebut berpotensi besar dapat mengganggu keamanan regional khususnya di kawasan Asia tenggara. Ketiga Negara yang terlibat langsung yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina menginisiasi pembentukan patroli angkatan laut yang terkoordinasi di Laut Sulu-Sulawesi yang mencontoh dari keberhasilan Patroli Selat Malaka / Malacca Straits Patrol (MSP) yang telah dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand di jalur air yang dikenal lokasinya yang sangat strategis. (www.maritimnews.com/2016/05/kerja-sama-trilateral-di-perairan-sulu-ulangi-keberhasilan-di-selat-malaka/, diakses pada tanggal 9 Maret 2019)

Berdasarkan data yang dikutip di *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) Information Sharing Center*, data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 merupakan tahun yang dimana tingkat kejahatannya cukup tinggi karena ada 10 serangan langsung dan 6 percobaan kejahatan yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi. Kejahatan di perairan ini tentunya sangat berpotensi membahayakan keselamatan para pengguna laut, karena dari tahun 2016 sampai tahun 2018 ada 13 serangan langsung kejahatan yang dilakukan di perairan tersebut, dan korban dari kejahatan di perairan tersebut mencapai 61 orang, yang dimana 28 korban telah dibebaskan karena telah adanya tebusan, 17

korban telah diselamatkan dan 7 korban tewas dan 9 korban masih dalam kondisi di tahan di penangkaran tahanan oleh kelompok terorisme yang terlibat didalamnya. (www.criticalmaritimeroutes.eu/2019/02/01/2018-recaap-isc-annual-report-piracy-and-armed-robbery-at-sea-declining-in-asia/, diakses pada tanggal 9 Maret 2019)

Angka kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di perairan itu secara tidak langsung memaksa tiga Negara di perbatasan yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk meningkatkan kerja sama keamanan di daerah perbatasan khususnya di laut Sulu-Sulawesi yang terkena dampak dari kejahatan yang terjadi. Tentunya hal yang menjadi perhatian yaitu pada Juni 2017, setelah 13 bulan melakukan diskusi diantara ketiga Negara yang terlibat langsung, ketiga negara meluncurkan program *Trilateral Maritime Patrols (TMP)*, yang diawali dari adanya sebuah *Joint Declaration* diantara ketiga Negara yang disepakati pada tanggal 5 Mei 2016 di Yogyakarta. Dari *Joint Declaration* tersebut yang telah disepakati oleh ketiga Negara, yang dimana hal itu menjadi sebuah acuan dari kerjasama antara ketiga Negara dalam mewujudkan sebuah kerjasama yang lebih lengkap dan serius melalui pertemuan di Manila, tanggal 20 Juni 2016 yang menghasilkan sebuah *Joint Statement* yang menjadi sebuah acuan implementasi kerjasama yang akan dilakukan oleh ketiga Negara tersebut.

Kepentingan yang mendasari masing-masing Negara melaksanakan kerjasama ini yaitu seperti Negara Indonesia yang memiliki kepentingan dalam menjaga wilayahnya dari ancaman teroris karena banyaknya warga Negara Indonesia yang diculik oleh para perompak di wilayah Sulu-Sulawesi. Kepentingan Malaysia dalam kerjasama ini yaitu di wilayah sekitar Sabah banyak terjadi kasus perompakan yang di

sebabkan oleh kelompok terorisme dan perompak. Kepentingan Filipina dalam kerjasama ini yaitu karena Filipina merupakan Negara yang menjadi penyebab banyaknya kasus terorisme karena terorisme dan tokoh perompak tersebut berasal dari Filipina dan Filipina ingin menyingkirkan kelompok perompak dan terorisme tersebut dengan melakukan kerjasama yang terkoordinasi diantara Negara disekitarnya.

Isi dari kerjasama *Joint Statement* yang telah disepakati diantaranya adalah melakukan kegiatan yang terkoordinasi di antara militer dari tiga negara, dengan fokus pada keamanan maritim, membangun pos komando militer bersama di lokasi yang ditunjuk termasuk penghubung militer di atas kapal masing-masing negara, kawasan maritim dan udara menjadi perhatian bersama, dibentuknya kelompok Kerja Patroli Maritim Trilateral yang akan menetapkan arahan operasional pada pelaksanaan patroli maritim trilateral, pusat komando maritim akan didirikan oleh masing-masing negara dan akan memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk penugasan masing-masing, Koridor transit di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama yang akan berfungsi sebagai jalur laut yang ditunjuk untuk pelaut yang memasuki wilayah laut di daerah perbatasan, dan berbagi informasi yang berkaitan dengan keamanan maritime. (Joint Statement Trilateral Meeting Among The Defence Of The Philippines, Malaysia and Indonesia)

Program Kerjasama trilateral ini merupakan sebuah reaksi dari masing-masing Negara yang salah satunya disebabkan oleh adanya konflik yang terjadi di Marawi, wilayah Filipina yang terjadi sebelum diresmikannya program kerjasama *Trilateral Maritime Patrol indomalphi* ini. Konflik antara pemerintah Filipina dengan kelompok teroris Abu Sayyaf di Marawi yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2017 yang

menjadi perhatian dunia pada saat itu menjadikan Negara-Negara di perbatasan yang berbatasan langsung dengan wilayah Filipina memandang bahwa diperlukannya sebuah kerjasama yang konkret dalam menghadang gerakan terorisme yang terjadi di perbatasan, karena kejahatan terorisme tentunya berpotensi mengancam kedaulatan di sebuah Negara.

Trilateral Maritime Patrol indomalphi merupakan program yang lahir dari sebuah tindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan melalui *Joint Declaration* dan *Joint Statement* dari ketiga Negara yang terlibat. Terbentuknya Program ini merupakan sebuah bentuk urgensi karena tingginya tingkat kejahatan di kawasan regional yang pada saat itu Filipina merupakan kawasan yang terafiliasi kelompok ISIS, Abu Sayyaf Grup (ASG) dan penjahat perompak lain yang memberikan dampak buruk bagi kawasan regional ASEAN. Menghadapi ancaman tersebut, ketiga Negara yang bekerja sama melakukan kegiatan seperti pertukaran informasi, melakukan patroli di wilayah perbatasan masing-masing Negara.

Adanya program kerjasama ini juga merupakan sebuah aksi dalam menghadang gerakan terorisme menyebar dari satu wilayah ke wilayah yang lain, seperti masuknya pengaruh kelompok radikal ISIS di Filipina ke wilayah Indonesia dan Malaysia. Program kerjasama ini adalah sebuah bentuk waspada dari pihak Negara-Negara yang terlibat dalam menghadang terorisme masuk kedalam wilayah kedaulatan Negara. Banyaknya kelompok radikal yang terafiliasi dengan ISIS seperti kelompok Abu Sayyaf Grup, dan kelompok lain yang berada di masing-masing Negara yang terlibat diperkirakan berjumlah 63 kelompok. Kelompok yang terafiliasi oleh ISIS tersebut tersebar di Indonesia sebesar 29 kelompok, 22 kelompok di Filipina dan 12 kelompok di Malaysia yang berpotensi

mengancam kedaulatan Negara dan kesejahteraan Negara tersebut yang menyebabkan rasa tidak aman di dalam Negara tersebut yang terancam kejahatan terorisme diantara Negara tersebut. (www.kaltaraprokal.co/read/news/14942, diakses pada tanggal 11 Maret 2019)

Peresmian program *Trilateral Maritime Patrol indomalphi* pada tanggal 19 Juni 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara membuktikan bahwa ketiga Negara benar-benar serius dalam menghadapi ancaman keamanan dikawasan maritim dalam pencegahan kejahatan di perbatasan masing-masing Negara, seperti kejahatan non tradisional yaitu perampokan, penculikan dan kejahatan lintas batas Negara di kawasan maritim. Dalam kesepakatan yang telah terjalin diantara ketiga Negara tersebut juga di implementasikan dengan dibuatnya sebuah *Command Center* yang berada di masing – masing wilayah Negara seperti milik Indonesia berada di Tarakan, *Command Center* Filipina berada di Bongao dan *Command Center* Malaysia berada di Tawau.

(www.kodammulawarman.mil.id/web/trilateral-maritime-patrol-indomalphi-resmi-dimulai, diakses pada tanggal 24 Maret 2019)

Kekuatan yang dikerahkan Negara yang terlibat kerjasama seperti kapal perang dari Malaysia KD-Baung-3509 dari Indonesia yaitu kapal perang berjenis KRI-Sidat-851 dan kapal perang dari Filipina yaitu berjenis BRP General Mariano Alvarez dan pada tahap peluncuran melibatkan sebanyak 126 personel dari masing-masing Negara dan melibatkan TNI Angkatan Laut, Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan *Philliphine Navy* (PN) dalam mewujudkan keamanan di perbatasan masing – masing Negara.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi. Adapun permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

“Bagaimana Kerjasama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) Melalui Program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Dapat Meningkatkan Keamanan Maritim Di Laut Sulu-Sulawesi Pada Tahun 2016-2019?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan Masalah Mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan minor, peneliti merumuskan masalah minor sebagai berikut:

1. Apa saja program kerja trilateral maritim patrol indomalphi yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan maritim di laut sulu-sulawesi?
2. Kendala apa saja yang dialami dalam program kerjasama trilateral maritim patrol indomalphi?
3. Bagaimana Hasil dari Program kerjasama diantara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam meningkatkan keamanan di laut sulu-sulawesi?

2. Kajian Pustaka

2.1 Hubungan Internasional

Sejak berakhirnya perang dingin, yang telah mengkahiri system bipolar dan menjadi sebuah system yang multipolar dalam persaingan kekuatan militer yang berubah menjadi persaingan dalam bidang ekonomi diantara Negara-negara di dunia. Isu hubungan internasional yang semula lebih terfokus pada isu politik dan keamanan, sekarang lebih meluas ke bermacam-macam isu seperti Hak Asasi Manusia, ekonomi, factor lingkungan hidup dan isu yang ramai dewasa ini yaitu terorisme. (Perwita & Yani, 2005:7)

Teori berfungsi sebagai piranti untuk menganalisis fenomena politik internasional. Teori Hubungan Internasional dibangun

melalui serangkaian perdebatan dan sangat dipengaruhi oleh peristiwa sejarah serta isu-isu di bidang politik dan ekonomi yang mengemuka pada kurun waktu tertentu. Ia menambahkan, teori Hubungan Internasional tidak dapat dikategorikan sebagai benar atau salah karena setiap teori memiliki keunggulan dan kelemahan serta berguna untuk menjelaskan fenomena politik internasional yang kompleks dan multidimensi. (Ashari, 2015:258)

2.2 Kerjasama Internasional

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang memberikan akses kepada suatu kemudahan dalam mengakses sesuatu informasi, termasuk akses kejahatan dari sebuah organisasi kejahatan lintas Negara yang memanfaatkan penggunaan akses kemajuan teknologi dan informasi untuk semakin memperluas jaringan kejahatan organisasi tersebut. Hal ini tentunya berpotensi menyebabkan kejahatan yang semakin merluas, dan kerjasama internasional merupakan sebuah pilihan dan solusi yang merupakan jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

Kerjasama internasional merupakan tempat dimana bertemunya berbagai macam kepentingan dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sebuah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek Hubungan Internasional. Permasalahan utama dari terjadinya sebuah kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan masing-masing Negara yang didapat dan keuntungan bersama yang di dapat melalui kerjasama yang dapat mendukung terjadinya sebuah kerjasama berdasarkan dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Dougherty & Robert, 2000:419).

Kerjasama Internasional merupakan suatu bentuk kondisi masyarakat

internasional yang saling ketergantungan satu sama lain. Diperlukannya suatu wadah yang dapat menampung sebuah kegiatan interaksi antar Negara dalam melakukan kerjasama demi terpenuhinya kebutuhan nasional. Kerjasama internasional ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Negara masing-masing dan ditentukan oleh persamaan kepentingan Negara yang terlibat dalam suatu kerjasama (Perwita & Yani, 2005:34).

2.3 Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan suatu sumber utama dari sebuah hukum internasional. Konvensi - konvensi atau perjanjian - perjanjian tersebut dapat berupa hubungan antar dua negara maupun banyak negara. Pada hakekatnya, dalam masyarakat internasional saat ini, perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara dalam menjalin hubungan antar negara di dunia. Perjanjian internasional merupakan sebuah instrumen untuk melaksanakan tujuan dari sebuah negara dan persetujuan negara-negara ataupun subjek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Dibuatnya sebuah Perjanjian internasional tentunya akan bertahap dan melalui proses melalui perumusan hukum internasional untuk kemudian mengatur berjalannya sebuah kegiatan antar negara yang bersangkutan.

Produk dan bentuk dari kerjasama internasional yakni ditandatanganinya sebuah perjanjian internasional. Seperti yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum yang umum dan diakui oleh negara-negara yang beradab dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Rudy, 2002: 84).

2.4 *Transnational Organize Crime*

Kejahatan di dunia internasional ini terus meningkat dan berkembang, baik itu modus atau targetnya sesuai dengan perkembangan zaman peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu sampai saat ini. Tidak terlepas dari itu juga, perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat modern atau milenial telah menjadikan suatu permasalahan sumber kejahatan yang baru. Kejahatan terorisme yang pada zaman ini semakin berkembang, Kemampuan dari sindikat terorisme lintas negara didukung dengan susunan organisasi yang terstruktur dan sistematis, sehingga kelompok penjahat ini sulit untuk “dijelajah” oleh pihak yang berwajib, disamping itu penggunaan teknologi dan informasi yang modern, digunakan oleh sindikat jaringan terorisme dalam penyebaran paham ekstrimnya itu semakin mempersulit pihak yang berwenang untuk mengetahui struktur organisasinya, dengan identitas organisasi yang sulit untuk dilacak, berpotensi memudahkan sindikat terorisme ini untuk memasuki suatu negara tanpa adanya gangguan yang berarti. Zaman modern yang pada saat ini telah memicu timbulnya suatu fenomena yang disebut *global village* yang dimana suatu individu dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas-batas tertentu seperti batas wilayah geografis, ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya dan hukum (Prisgunanto, 2012:17).

Fenomena *transnational organized crime* yang dipicu dari adanya aksi serangan terorisme di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang pada saat itu terorisme menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh dunia, karena menjadi ancaman yang sangat membahayakan kedaulatan Negara. Ancaman yang dihadapi oleh pemerintah Amerika Serikat pada saat itu memicu pemerintah AS melakukan kerjasama dengan Negara – Negara yang

masuk kedalam kategori *weak states*, dikarenakan tingkat kemiskinan dan tingkat korupsi yang tinggi dan lemahnya institusi yang ada di dalam Negara *weak states* yang menyebabkan Negara yang termasuk kedalam kategori *weak states* rentan terhadap masuknya terorisme di Negara tersebut dan AS berusaha untuk menghadang gerakan terorisme tersebut (Triwahyuni, 2008:1)

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Untuk Melakukan suatu penelitian, diperlukan sebuah desain tentang objek yang akan di teliti. Metode dari penelitian ini adalah kualitatif. Dengan menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan cara menelaah dan memahami apa yang ada didalam buku, teori dan pakar yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut dan juga didukung dengan data dari media elektronik internet maupun media cetak. Dengan teknik studi kepustakaan peneliti dapat mengumpulkan data sekunder mengenai kerjasama Indonesia, Malaysia dan Filipina melalui program trilateral maritim indomalphi dalam meningkatkan keamanan maritime di laut sulu-sulawesi.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang digunakan dalam teknik pengumpulan data melalui studi literatur, penelusuran data online dan dokumentasi. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini difokuskan pada kerjasama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina melalui program Trilateral *Maritime* Patrol Indomalphi di laut Sulu-Sulawesi, apa saja program kerja yang dimiliki oleh program Trilateral *Maritime* Patrol Indomalphi dalam meningkatkan keamanan di laut Sulu-Sulawesi, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Trilateral *Maritime* Patrol Indomalphi dan bagaimana hasil dari kerjasama diantara

Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam meningkatkan keamanan di laut sulawesi.

3.3 Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data peneliti menggunakan metode analisis data dengan cara melakukan penelitian data yang diperoleh dari laman situs resmi dari Kementerian Pertahanan dan situs laman internet resmi TNI Angkatan Laut dan media luar dari Malaysia dan Filipina. Peneliti juga melakukan studi literatur di perpustakaan khusus penelitian seperti CSIS dan LIPI untuk membandingkan hasil data yang diperoleh dari media elektronik.

3.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, sebagaimana peneliti menganalisis data-data yang diperoleh, baik itu melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, bertujuan agar data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Penyajian data, peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa yang disajikan baik itu data primer atau sekunder yang didapatkan dari pengumpulan data yakni instansi pemerintah terkait. Peneliti menghubungkan teori atau konsep dengan data-data yang diperoleh sebagai pijakan peneliti dalam memahami dan melakukan analisa dalam menjawab rumusan masalah di penelitian yang akan dilakukan tersebut.

3.5 Rencana Pengumpulan Data

Rencana Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Data yang dibutuhkan	Teknik pengumpulan data	Sumber
1	Data Kejahatan di laut Sulu - Sulawesi	Studi Pustaka, Wawancara	Buku, Internet Staf Kementerian Pertahanan, International Maritime Organization (IMO) Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Data Mengenai Kerjasama Trilateral	Studi Pustaka Wawancara	Buku, Internet, Staf Kementerian Pertahanan

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Objek Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Indonesia

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia didunia dengan mempunyai pulau sebanyak 17.504 pulau, baik pulau yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 5,2 juta km² yang terdiri dari perairan dan daratan yang berbanding antara 4:1 yang lautan mempunyai luas wilayah sebesar 3,3 juta km² dan luas daratan sebesar 1,9 juta km². Secara letak geografis, Indonesia terletak diantara 6° LU-11° LS dan 95° BT-141° BT. Apabila luas Indonesia dibentangkan, wilayah

Indonesia berada di sepanjang 3.997 mil diantara samudera hindia dan samudera pasifik. Letak posisi Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera yang memberi pengaruh yang besar bagi masyarakat Indonesia seperti faktor sosial, budaya dan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang berbentuk republik, yang dimana pemimpin di Indonesia dan Dewan pemerintahan legislatif dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Kepemimpinan Presiden Indonesia berlaku selama 5 tahun sekali, dan dapat dilanjutkan sampai dua periode.

4.1.1.1 Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Indonesia yang pada saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memiliki visi dan tujuan untuk menjadi Negara poros maritim dunia. Presiden Jokowi melihat bahwa Indonesia mempunyai potensi di sektor laut yang dimana sumber daya laut Indonesia yang kaya tersebut dengan luas wilayah laut yang sangat luas perlu ditangani secara maksimal. Contohnya seperti pengelolaan sumber daya laut di laut Sulawesi dan peningkatan keamanan di selat malaka demi tercapainya sebuah tujuan Indonesia yaitu menjadi poros maritim dunia. Contoh kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan tujuan sebagai poros maritim dunia yaitu dengan penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang berupa pedoman dalam melaksanakan kegiatan di bidang kelautan melalui lembaga yang ditunjuk dalam rangka perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

4.1.2 Gambaran Umum Keamanan Maritim Di Laut Sulu-Sulawesi

Wilayah ketiga Negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina

mempunyai wilayah perbatasan yang mencakup beberapa jalur perdagangan melewati jalur laut yang sangat penting bagi ketiga Negara dan wilayah perbatasan ketiga Negara tersebut juga mempunyai kekayaan ekologi yang berada di sekitar laut Sulu-Sulawesi. Laut Sulu dan laut Sulawesi adalah perairan besar di bagian timur Asia Tenggara. Laut Sulu dibatasi di barat laut oleh pulau Palawan di Filipina, di sebelah tenggara oleh kepulauan Sulu yang terdiri dari pulau Basilan, Jolo dan Tawi-Tawi dan di barat daya oleh negara bagian Sabah, Malaysia timur. Laut Sulawesi berbatasan dengan kepulauan Sulu dan Mindanao di utara, Sabah dan provinsi Kalimantan di sebelah barat, dan Sulawesi di selatan.

Wilayah Laut Sulu-Sulawesi merupakan jalur laut yang padat karena dari jalur laut Sulu dari Filipina Selatan ke wilayah perairan Negara bagian di Malaysia Timur Sabah, perairan tersebut dilewati oleh 13.000 Kapal pertahunnya, dan menjadi daerah yang sangat menakutkan karena banyaknya perompak dan banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di wilayah perairan laut Sulu-Sulawesi. Laut Sulu merupakan wilayah perairan yang dianggap sangat berbahaya, karena banyaknya kasus perompakan dan penculikan yang terjadi di wilayah laut Sulu tersebut, yang salah satunya dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf Grup (ASG) yang menjadi terror sejak tahun 2001. Pada rentang waktu dari tahun 2001 sampai dengan sekarang terjadi banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf Grup seperti kasus penculikan yang meminta tebusan dan perampokan di wilayah perairan timur Sabah dan wilayah laut Sulu.

Abu Sayyaf Group dan kelompok teroris Filipina Selatan dan kelompok perompak bersenjata yang bertujuan untuk mendirikan sebuah Negara baru yang terdiri dari bangsa Moro yaitu wilayah Filipina selatan yang meliputi beberapa wilayah di

daerah kawasan tersebut seperti adanya pulau Palawan, Mindanao, Basilan dan wilayah perairan di daerah laut sulu, yang dimana teroris tersebut menyebarkan terornya kepada Negara tetangga yaitu Malaysia dengan menyerang sebuah resort di wilayah Malaysia dan menculik sebanyak 21 orang, dan juga teroris tersebut banyak menculik warga Negara Indonesia yang berada di sebuah kapal di wilayah laut Sulu-Sulawesi yang bertujuan untuk meminta tebusan (www.dunia.tempo.co/read/1171142, diakses pada tanggal 9 Juli 2019).

4.1.3 Ancaman Keamanan Wilayah Perbatasan Laut Sulu-Sulawesi

Ancaman pembajakan kapal dan ancaman terorisme adalah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang atau kejahatan yang terorganisir yang merupakan sebuah masalah yang telah diketahui dari sejak manusia menggunakan atau memanfaatkan sebuah sumber daya laut untuk kegiatan perdagangan. Perkembangan dari teknologi modern saat ini dan kemajuan arus globalisasi yang secara tidak langsung mendukung dan memudahkan sebuah peningkatan kasus perompakan yang terjadi karena kemajuan dari teknologi yang memudahkan para penjahat dalam melakukan aksi kriminal nya tersebut.

Ancaman Perompakan dan Terorisme di Wilayah perbatasan laut Sulu-Sulawesi menjadi sebuah ancaman bagi para pedagang yang melintasi jalur tersebut, karena tempat tersebut banyak ditempati oleh kelompok sindikat perompak-perompak dan teroris Abu Sayyaf Group. Wilayah perbatasan jalur laut Sulu-Sulawesi menjadi sebuah perhatian diantara ketiga Negara yang berbatasan langsung dengan ketiga Negara tersebut, karena sejak tahun 2016 kejahatan perompakan dan penculikan yang dilakukan oleh perompak dan teroris Abu

Sayyaf Group menunjukkan tingginya kejahatan di wilayah tersebut.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Program Kerja Trilateral Maritime Patrol Indomalphi

Kerjasama yang terjalin pertama kali diantara Indonesia Malaysia dan Filipina melalui kesepakatan *Joint Declaration* pada tahun 2016 menjadi sebuah kunci terbentuknya program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi. Program kerja yang dibentuk dalam melaksanakan patroli terkoordinasi adalah sebagai berikut:

a. Port Visit Trilateral Maritime Patrol Indomalphi

Kolaborasi diantara ketiga Negara dalam menjalankan sebuah program kerjasama patroli terkoordinasi yaitu dengan melakukan kunjungan kerja dan melakukan patroli gabungan yang dimana gabungan diantara ketiga Negara yang bekerja sama, dengan melakukan kunjungan ke setiap pelabuhan yang telah disepakati diantara ketiga Negara untuk melakukan hubungan kerjasama, baik itu dalam bentuk latihan militer bersama, melaksanakan kerjasama di lapangan dan menyusun rencana dalam menghadapi ancaman yang ada di Jalur laut Sulu-Sulawesi.

b. Maritime Command Center

Maritime Command Center merupakan markas yang berupa pos komando untuk memfasilitasi dan menunjukkan rute laut yang diperlukan dalam pemilihan rute laut patroli yang dilakukan di masing-masing Negara. Pos *Maritime Command Center* yang ada di Indonesia terletak di wilayah Tarakan, Pos milik Malaysia berada di wilayah Tawau, dan Pos komando milik Filipina berada di wilayah Bongao.

Command Center merupakan alat atau media pendukung dalam pelaksanaan program patroli terkoordinasi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam

melakukan komunikasi dan pertukaran informasi dalam pelaksanaan patroli maritime, yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan patroli karena *Maritime Command Center* bertugas memberi arahan kepada petugas patroli terkait daerah mana yang harus dilakukan penjagaan dan memberikan arahan dalam mengambil suatu keputusan jika menghadapi situasi ancaman dari perompak maupun teroris yang ada di laut Sulu-Sulawesi.

c. *Sea Lane Corridor*

Sea Lane Corridor dibentuk untuk membuat jalur pelayaran yang ada di perairan laut Sulu-Sulawesi yang merupakan jalur pelayaran yang aman dan dapat dilintasi oleh kapal-kapal perdagangan. Jalur tersebut terbentang sepanjang laut Sulawesi sampai perairan selatan di Filipina. *Sea Lane Corridor* merupakan jalur patroli yang disiapkan oleh program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi yang dikhususkan untuk kapal-kapal perdagangan yang melewati jalur laut Sulu-Sulawesi. Dalam penentuan jalur *Sea Lane Corridor*, Satgas Trilateral Maritime Patrol Indomalphi mempertimbangkan aspek-aspek tertentu seperti jarak dan keamanan yang ada di laut Sulu-Sulawesi. Dalam pembentukan *Sea Lane Corridor* sebagai upaya dalam pengamanan jalur laut yang lebih ketat, jalur koridor tersebut ditempatkan di beberapa wilayah yang rawan terjadi perompakan yang terletak di perbatasan ketiga Negara. Laut Filipina selatan yang rawan terjadi kejahatan perompak, menjadi contoh pertama dalam penerapan *Sea Lane Corridor*, yaitu terletak wilayah selatan Filipina yaitu di teluk Moro dan Selat Basilan.

4.2.2 Kendala Program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi

Terlaksananya program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi di Laut Sulu –

Sulawesi tentunya menjadi sebuah usaha peningkatan keamanan dalam tercapainya suatu keberhasilan yang sama dengan program Malacca Strait Patrol dan dapat merubah pandangan dunia internasional tentang keamanan di wilayah laut Sulu – Sulawesi. Dalam pelaksanaan sebuah program kerja sama keamanan ini juga tidak terlepas dari adanya kendala atau sebuah tantangan yang dihadapi. Kendala yang dialami program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi, seperti adanya sebuah perbedaan kapabilitas militer diantara ketiga Negara dan adanya trust issues diantara ketiga Negara yang sering berkonflik mengenai wilayah batas teritorial yang menjadi sebuah permasalahan yang dilihat secara aspek historis masing – masing negara.

a. *Trust Issues*

Banyaknya konflik yang terjadi diantara ketiga Negara dirasa bisa menimbulkan rasa saling tidak percaya dan saling mencurigai satu sama lain yang bisa berdampak pada hubungan internasional diantara ketiga Negara tersebut. Seperti contoh pada kerjasama tiga Negara diantara Indonesia, Malaysia dan Singapura yang saat itu pihak Indonesia dan Malaysia menolak dalam pembuatan program kerjasama *Malacca Strait Patrol*, karena pihak Indonesia menganggap bahwa patroli yang dilakukan dengan Negara lain berpotensi dapat mengancam kedaulatan Negara dan melanggar batas teritorial Negara Indonesia, karena hal tersebut terjadi karena adanya rasa curiga terhadap Malaysia yang sering melakukan pelanggaran batas wilayah teritorial terhadap wilayah kekuasaan Indonesia

Rasa saling curiga diantara Indonesia, Malaysia dan Filipina yang didasari dari faktor sejarah diantara ketiga Negara tersebut berpotensi dapat menghambat program kerjasama Trilateral Maritime Patrol Indomalphi, seperti belum

terselesaikannya perbatasan laut diantara Malaysia dan Filipina terkait sebagian pulau Sabah yang menimbulkan ketidak jelasan perbatasan di sepanjang perbatasan laut diantara kedua Negara tersebut. Dampak dari ketidak jelasan suatu perbatasan diantara Malaysia dan Filipina tersebut bisa menyebabkan rasa keraguan dalam pelaksanaan patroli di daerah perbatasan tersebut dan berpotensi tidak maksimalnya suatu pelaksanaan operasi patroli diantara ketiga Negara tersebut. Dalam pelaksanaan Trilateral Maritime Patrol Indomalphi diantara ketiga Negara, lemahnya suatu koordinasi karena ada perbedaan klaim wilayah diantara ketiga Negara yaitu perbedaan garis perbatasan maritim diantara Negara Malaysia dan Filipina yang berpotensi terus menjadi daerah yang rawan akan kejahatan perompak dan kejahatan terorisme.

4.2.3 Analisis Hasil Kerjasama Program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi

Setelah resmi diluncurkannya program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi, yaitu program patroli terkoordinasi diantara Indonesia, Malaysia dan Filipina, angka kejahatan yang terjadi di wilayah perairan laut Sulu-Sulawesi mengalami penurunan hingga awal tahun 2019. Laporan dari *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP) menuliskan bahwa tingkat kejahatan perompak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 melalui laporan *Annual Report Piracy And Armed Robbery Againsts Ship In Asia* telah menurun tingkat kejahatannya (www.recaap.org/annualreport2017, diakses pada tanggal 27 Juli 2019).

Area jalur patroli Trilateral *Maritime Patrol Indomalphi* yang dikhususkan dalam area kawasan disekitar perbatasan Filipina yang menjadi tempat tinggalnya para

penjahat, seperti di daerah kepulauan Sulu yaitu Pulau Tawi-Tawi, pulau Jolo, Pulau Basilan yang dimana daerah tersebut menjadi daerah yang rawan akan terjadinya kejahatan perompakan yang terjadi di daerah perbatasan laut Sulu-Sulawesi.

Peluncuran Trilateral *Maritime Patrol Indomalphi* ini dalam implementasi kerjasama diantara ketiga Negara merupakan hal yang efektif dalam pengawasan dan membantu pelaksanaan program patroli terkoordinasi demi tercapainya sebuah tujuan meningkatkan keamanan di laut Sulu-Sulawesi, dengan menurunnya tingkat kriminalitas di wilayah perairan laut Sulu-Sulawesi sejak program ini diluncurkan pada tahun 2017, menunjukkan bahwa program Trilateral *Maritime Patrol Indomalphi* ini merupakan program yang efektif dalam meningkatkan keamanan maritim, khususnya di wilayah laut Sulu-Sulawesi.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan tentang bagaimana kerjasama Trilateral *Maritime Patrol Indomalphi* yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan di laut Sulu-Sulawesi yang berawal dari pertemuan ketiga Negara melalui pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016 yang dimana ketiga Negara tersebut sepakat dalam peningkatan keamanan di daerah perairan laut Sulu-Sulawesi dengan menyepakati *Joint Declaration*, yang dimana didalam kesepakatan *Joint Declaration* tersebut membahas tentang kesepakatan melakukan patroli yang terkoordinasi diantara wilayah perbatasan laut Sulu-Sulawesi. Kesepakatan lebih lanjut yang menegaskan bahwa ketiga Negara serius dalam meningkatkan keamanan di laut Sulu-Sulawesi yaitu dengan diadakannya kembali pertemuan diantara ketiga Negara di Manila tanggal 20 Juni 2016 yang

menghasilkan kesepakatan *Joint Statement* diantara ketiga negara bahwa akan dibentuk suatu program patroli yang terkoordinasi yang dilakukan di darat, laut dan udara.

Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan sebuah respon dari meningkatnya kejahatan perompak dan terorisme yang terjadi di daerah laut Sulu-Sulawesi, seperti banyaknya kejahatan perompak yang menculik untuk meminta tebusan dan adanya kelompok Abu Sayyaf Group yang meneror kapal-kapal perdagangan yang menggunakan jalur laut Sulu-Sulawesi. Kerjasama Trilateral ini terbukti dapat menurunkan angka kejahatan yang terjadi di wilayah perairan laut Sulu-Sulawesi, seperti pada tahun 2016 yang dilaporkan menjadi tahun yang sangat buruk bagi keamanan di laut Sulu-Sulawesi karena tingginya angka perompakan dan penculikan di perairan tersebut. Trilateral *Maritime Patrol* Indomalphi yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2017 menunjukkan bahwa ketiga Negara serius dalam peningkatan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi, karena pada saat program patroli terkoordinasi ini diluncurkan, terjadi penurunan tingkat kejahatan yang terjadi di perairan laut Sulu-Sulawesi antara rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan angka kejahatan setiap tahunnya.

5.2 Saran

Setelah melihat hasil dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap kerjasama Trilateral *Maritime Patrol* Indomalphi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

a. Saran untuk pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina yang dimana kerjasama ini dilakukan oleh Negara

yang saling bertetangga, maka peneliti menyarankan untuk tetap menjaga komunikasi dengan baik demi menjaga hubungan yang baik antar Negara dan program kerjasama dapat dilakukan dengan lebih baik.

b. Saran untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan pada peneliti yang akan mengambil tema yang sama untuk melakukan pencarian data yang lebih mendalam dan dari berbagai sumber yang lebih luas dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Agusman, Damos Dumoli. 2010. Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ashari, Khasan. 2015. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Burchill, Scott dan Linklater Andrew. 2009. Teori-Teori Hubungan Internasional. Nusa Media
- Dougherty, James E. &, Robert L. Pfaltzgraff Jr., 2000. *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey*, 5th ed., New York Longman.
- Jackson, Robert H. Dan George Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global Dalam Teori & Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Prisgunanto, Ilham. 2012. *Komunikasi dan polisi*. Jakarta: C.V Prisani Cendikia. Hlm 17
- Rachmawati, Iva. 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Rudy, Teuku May. 2002. *Hukum Internasional I*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Muliatama, Dinar Rizky. 2017. *Kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina Dalam Mengatasi Keamanan Maritim (Studi Kasus: Pembajakan Abu Sayyaf Grup di Perairan Sulu)*. Universitas Al Azhar Indonesia.
- Triwahyuni, Dewi. 2008. *Perubahan Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Pasca 11 September 2001 Untuk Kawasan Asia Tenggara*. Universitas Komputer Indonesia.

Rujukan Elektronik

- Antara News. 2019. *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*. Melalui <https://www.antaranews.com/foto/802399/trilateral-maritime-patrol-indomalphi> [02/03/2019]
- Critical Maritime Routes Programme. 2018. *2018 ReCAAP ISC Annual Report: Piracy and armed robbery at sea declining in Asia*. Melalui <https://criticalmaritimeroutes.eu/2019/02/01/2018-recaap-isc-annual-report-piracy-and-armed-robbery-at-sea-declining-in-asia/> [24/03/2019]
- Kementrian Luar Negeri RI. 2016. *Joint Declaration of Foreign Ministers and Chiefs of Defence Forces of*

Indonesia-Malaysia-Philippines.

Melalui <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Joint-Declaration-Foreign-Ministers-and-Chiefs-of-Defence-Forces-of-Indonesia-Malaysia-Philippines.aspx> [10/03/2019]

Kementrian Luar Negeri RI. 2016. *Pertemuan Trilateral Tiga Negara Bahas Tantangan Bersama di Perairan*. Melalui <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Pertemuan-Trilateral-Tiga-Negara-Bahas-Tantangan-Bersama-di-Perairan.aspx> [7/03/2019]

Kementrian Pertahanan RI. 2017. *Patroli Laut Tiga Negara Dimulai, Apa Saja Rencana Ryamizard?*. Melalui <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/06/27/patroli-laut-tiga-negara-dimulai-apa-saja-rencana-ryamizard.html> [05/03/2019]

Kodam VI Mulawarman. 2017. *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Resmi Dimulai*. Melalui <https://www.kodam-mulawarman.mil.id/web/trilateral-maritime-patrol-indomalphi-resmi-dimulai/> [24/03/2019]

Liputan 6. 2016. *Ini Jalur Aman Pelayaran Laut Sulawesi-Filipina Selatan*. Melalui https://www.liputan6.com/news/read/2544890/ini-jalur-aman-pelayaran-laut-sulawesi-filipina-selatan?utm_expId=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F [12/07/2019]

Maritimnews. 2016. *Kerja Sama Trilateral di Perairan Sulu, Ulangi Keberhasilan di Selat Malaka*. Melalui <http://maritimnews.com/2016/05/kerja-sama-trilateral-di-perairan-sulu->

- ulangi-keberhasilan-di-selat-malaka/ [9/03/2019]
- Maritimnews. 2017. Upaya Atasi Perompak di Perairan Perbatasan Indonesia-Filipina (Bagian I). Melalui <http://maritimnews.com/2017/05/upaya-atasi-perompak-di-perairan-perbatasan-indonesia-filipina-bagian-i/> [15/07/2019]
- Maritimnews. 2017. Upaya Atasi Perompak di Perairan Perbatasan Indonesia-Filipina (Bagian II). Melalui <http://maritimnews.com/2017/05/upaya-atasi-perompak-di-perairan-perbatasan-indonesia-filipina-bagian-ii/> [15/07/2019]
- Maritimnews. 2017. Upaya Atasi Perompak di Perairan Perbatasan Indonesia-Filipina (Bagian III). Melalui <http://maritimnews.com/2017/05/upaya-atasi-perompak-di-perairan-perbatasan-indonesia-filipina-bagian-iii/> [15/07/2019]
- New Straits Times. 2019. *RMN blocks 'rat routes' used by cross-border criminals at Sulu and Sulawesi seas.* Melalui <https://www.nst.com.my/news/nation/2018/09/408144/rmn-blocks-rat-routes-used-cross-border-criminals-sulu-and-sulawesi-seas> [17/07/2019]
- Radar Kaltara. 2017. *Antisipasi ISIS, Pengawasan Perbatasan Ditingkatkan.* Melalui <http://kaltara.prokal.co/read/news/14942-antisipasi-isis-pengawasan-perbatasan-ditingkatkan.html> [25/03/2019]
- The Diplomat. 2016. *Abductions at Sea: A 3-Way Security Challenge for Indonesia, Malaysia, and the Philippines.* Melalui <https://thediplomat.com/2016/05/abductions-at-sea-a-3-way-security-challenge-for-indonesia-malaysia-and-the-philippines/> [05/07/2019]
- The Diplomat. 2018. *What's Next for the Sulu Sea Trilateral Patrols?.* Melalui <https://thediplomat.com/2018/09/whats-next-for-the-sulu-sea-trilateral-patrols/> [06/03/2019]
- TNI AL. 2017. *Satgas Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Mantapkan Demonstrasi Dengan TFG.* Melalui <https://www.tnial.id/News/OperasiLatihan/tabid/80/articleType/ArticleView/articleId/37028/Default.aspx> [12/07/2019]